

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DESADATARNANGKA KECAMATAN SAGARANTEN KABUPATEN SUKABUMI

Muhammad Irfan Habibi

email: jscone@unucirebon.ac.id

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

Abstract

This research follows Edward III's theory from Anggara (2018: 250) which identifies key implementation variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The main premise is that the successful implementation of the Child Identity Card Policy in Datarnangka Village, Sagaranten Sub-district, Sukabumi District depends on clear communication, adequate resources, disposition of implementers, and a flexible bureaucratic structure. Field results show that communication is not optimal, resources are limited, disposition is not maximized, and the bureaucratic structure needs adjustment. This research was located in Datarnangka Village, involving 6 informants from the UPTD of Sagaranten region, the Head of Datarnangka Village, the Head of the Village Service Section, and residents. Data were collected through observation, interviews and document study using observation guides, interview guidelines and field notes. Validity was asserted through triangulation, while analysis was conducted using a reduction process. The findings show the importance of implementation factors. Implementation of the Child Identity Card Policy has not been optimal, related to communication, limited resources, disposition has not been maximized, and the bureaucratic structure needs improvement in the future.

Keywords: Implementation, Policy, Child Identity Card.

Abstrak

Penelitian ini mengikuti teori Edward III dari Anggara (2018:250) yang mengidentifikasi variabel kunci implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Premis utama adalah keberhasilan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Desa Datarnangka, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi tergantung pada komunikasi jelas, sumber daya memadai, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang fleksibel. Hasil lapangan menunjukkan komunikasi belum optimal, sumber daya terbatas, disposisi belum maksimal, dan struktur birokrasi perlu penyesuaian. Penelitian ini berlokasi di Desa Datarnangka, melibatkan 6 informan dari UPTD wilayah Sagaranten, Kepala Desa Datarnangka, Kepala Seksi Pelayanan Desa, dan warga. Data dikumpulkan lewat observasi, wawancara, dan studi dokumen dengan panduan observasi, pedoman wawancara, dan pencatatan lapangan. Validitas ditegaskan melalui triangulasi, sementara analisis dilakukan dengan proses reduksi. Temuan menunjukkan pentingnya faktor-faktor implementasi. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak belum optimal, terkait komunikasi, sumber daya terbatas, disposisi belum maksimal, dan struktur birokrasi perlu peningkatan di masa mendatang.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Kartu Identitas Anak.

1. Pendahuluan

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah juga semakin kompleks. Dalam rangka menghadapi tantangan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi bertekad untuk mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib secara nasional, sesuai dengan Undang-undang. Administrasi kependudukan ini diatur oleh UU Nomor 24 tahun 2014, yang mendefinisikan Administrasi Kependudukan sebagai serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan dalam pelayanan publik dan pembangunan sektor publik.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib melalui penerbitan dokumen kependudukan menjadi kunci dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sipil. Dokumen-dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan lainnya, menjadi landasan identifikasi bagi penduduk. Terkait dengan hal ini, pemerintah pusat mengimplementasikan program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai langkah terbaru dalam meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, terutama bagi anak-anak yang belum mencapai usia 17 tahun. Program KIA ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan hak konstitusional kepada anak-anak yang belum memiliki identitas kependudukan nasional dan terintegrasi.

KIA memiliki berbagai manfaat, di antaranya sebagai bukti resmi dan sah untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun, serta sebagai tanda pengenal yang diperlukan dalam berbagai hal seperti pendaftaran sekolah, pembuatan e-KTP, dokumen keimigrasian, pembuatan kartu BPJS, pemenuhan hak anak, dan lainnya. Namun, untuk memastikan pelayanan publik berkembang dengan optimal sesuai harapan masyarakat, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang relevan. Implementasi kebijakan ini menjadi elemen penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan yang diinginkan.

Edward III dalam Anggara (2018:250) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, di Desa Datarnangka Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, Kartu Identitas Anak (KIA) belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat, yang menyebabkan pencapaian program KIA belum optimal. Dalam melaksanakan kebijakan ini, diperlukan beberapa langkah untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu diinvestigasi dan diatasi, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya KIA, rendahnya komunikasi dan sosialisasi dari aparat desa, kurangnya sumber daya manusia baik pada aparat desa maupun masyarakat, serta kurangnya kerjasama dalam struktur birokrasi desa terkait dengan penanganan KIA.

Dari observasi awal, terdapat beberapa permasalahan yang muncul:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang urgensi Kartu Identitas Anak (KIA).
2. Pandangan bahwa KIA hanya diperlukan jika memang sangat dibutuhkan.
3. Masih ada anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran.
4. Sosialisasi dari aparat desa kepada masyarakat mengenai KIA masih belum memadai.

Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi implementasi KIA di Desa Datarnangka Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki implementasi kebijakan ini.

2. Metode penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, sebuah metodologi yang melibatkan peneliti dalam pemahaman mendalam terhadap konteks dan makna yang mendasari fenomena yang diteliti. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali nuansa, pandangan, dan dinamika yang kompleks dalam suatu konteks tertentu. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat naratif dan berasal dari berbagai sumber, termasuk wawancara, pengamatan, serta penggalan dokumen. Sumber data tersebut mencakup data

primer yang diperoleh langsung dari informan serta data sekunder yang diambil dari dokumen yang relevan.

Pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan dalam memahami konteks yang lebih dalam dan menggali berbagai perspektif yang ada. Dalam konteks penelitian ini, data dianalisis berdasarkan indikator utama penelitian, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dimensi-dimensi penting yang memengaruhi implementasi KIA secara holistik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi melibatkan pengamatan peneliti terhadap berbagai situasi, tempat, serta interaksi yang terjadi dalam konteks implementasi KIA. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman langsung dari informan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk menggali data sekunder yang dapat memberikan konteks lebih lanjut.

Metode penelitian kualitatif dalam konteks ini bisa dianggap sebagai metode postpositivistik, seiring dengan landasan filosofi postpositivisme yang menekankan pada pemahaman mendalam dan interpretatif terhadap fenomena yang diamati. Proses penelitian yang kurang terstruktur dan lebih fleksibel dapat dianggap sebagai pendekatan artistik, di mana peneliti memiliki kebebasan dalam menafsirkan dan menganalisis data dengan pendekatan yang lebih kreatif. Selain itu, metode ini juga dapat disebut sebagai metode interpretatif, karena fokus utamanya adalah pada interpretasi makna dan pemahaman terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Dalam keseluruhan metodologi ini, peneliti memiliki peran yang sangat aktif dalam menggali data, menganalisis makna yang tersembunyi, dan memberikan konteks yang mendalam dalam mengungkap dinamika implementasi KIA di Desa Datarnangka Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabum

3. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Datarnangka, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Desa ini memiliki visi yang mengarah pada upaya membangun masyarakat yang religius, maju, dan sejahtera. Misi-misi yang ditetapkan meliputi pendorong peningkatan kegiatan keagamaan, peningkatan sarana pelayanan sosial dasar,

pengembangan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi perdesaan, optimalisasi pemberdayaan masyarakat, penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa.

Pembahasan

Pada penelitian yang membahas Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Desa Datarnangka, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, digunakan konsep penelitian berdasarkan teori Edward III dalam Anggara (2018:250), yang mengidentifikasi empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Analisis Terhadap Komunikasi

Aspek komunikasi memiliki peran yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif antara implementor dan masyarakat merupakan faktor kunci dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa komunikasi terkait implementasi KIA di Desa Datarnangka masih belum berjalan dengan jelas. Kurangnya komunikasi efektif dan komunikasi antar staf menjadi faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap program ini.

Analisis Terhadap SumberiDaya

Sumber daya memiliki peran penting dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program harus memahami tugas dan tanggung jawab mereka, sedangkan sumber daya finansial mendukung kelancaran program. Namun, dalam implementasi KIA di Desa Datarnangka, terdapat permasalahan terkait sumber daya. Sumber daya manusia dan finansial masih belum memadai, dan ini berdampak pada kualitas pelaksanaan program.

Analisis Terhadap Disposisi

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi. Disposisi pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen tinggi terhadap kebijakan dapat mendorong pencapaian tujuan. Namun, berdasarkan temuan penelitian, disposisi pelaksana program KIA di Desa Datarnangka belum sepenuhnya optimal. Sikap masyarakat juga belum sepenuhnya mendukung program ini.

Analisis Terhadap Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi mekanisme penting dalam mengelola pelaksanaan kebijakan. Struktur ini dapat mendukung kelancaran implementasi dengan mengakomodasi berbagai permasalahan yang muncul. Namun, dalam konteks implementasi KIA, struktur birokrasi di Desa Datarnangka juga masih memiliki permasalahan. Komunikasi antar lembaga dan antar birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk memastikan keselarasan dan kelancaran program.

Dalam keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Desa Datarnangka belum berjalan dengan optimal. Kurangnya komunikasi efektif, keterbatasan sumber daya, disposisi yang belum optimal, dan struktur birokrasi yang masih perlu peningkatan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, alokasi sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang berkomitmen, serta peningkatan kerja sama antar lembaga dalam birokrasi desa untuk memastikan keberhasilan implementasi KIA di Desa Datarnangka.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian disimpulkan sebagai berikut :

1. Komunikasi implementasi kebijakan diketahui belum berjalan dengan jelas, hal ini disebabkan masih kurangnya komunikasi yang efektif dan komunikasi antar staf terkait dengan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Desa Datarnangka Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi.
2. Sumber daya Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Desa Datarnangka Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi belum memadai dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial.
3. Sikap pelaksana Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Desa Datarnangka Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi belum bersungguh-sungguh, hal ini dapat dilihat dari respon implementor sebagai pelaksana kebijakan belum konsisten terhadap komitmen dan respon masyarakat yang kurang memperhatikan tentang kegunaan KIA tersebut.

4. Struktur birokrasi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Desa Datarnangka Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi belum berjalan dengan tepat karena masih kurangnya komunikasi antar lembaga dan juga antar birokrasi.

Daftar Pustaka

- Anggara Sahya (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Agustino Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Agus Purwanto. (2014). *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*. Puwokerto.
- Agustino, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press
- Kolter, 2009. *Perencanaan dan Proses Kebijakan*. Jakarta: GV Vita
- Mahmudi, 2013. *Menejemen Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Maleong, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Nasucha, 2020. *Buku Reformasi Adminitrasi Public Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Grasindo
- Subarsono, 2001. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep. Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Siyoto, Sandu dan Sodik. M.Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudiyono, Lue. (2016). *Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan*. Yogyakarta.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan;
- Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir;
- Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
- Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.